

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELANCARAN DISTRIBUSI PUPUK
BERSUBSIDI PADA PETANI PADI SAWAH
(Studi Kasus: Desa Purbaganda Kecamatan Pematang Bandar
Kabupaten Simalungun)**

Oleh :

Muhammad Fadly^{1)*}, Zulkarnain Lubis²⁾, Mitra Musika³⁾

¹⁾Staff Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

²⁾³⁾Dosen Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

Subsidized fertilizer is one of the means of production is the availability of subsidized by the government to farmers and Retail Price (MRP) was regulated by Government Regulation. 87 / Permentan / SR.130 / 12/2011. The purpose of this study was to determine the influence of factors as price, distance, number of requirements, and policies for the smooth distribution of subsidized fertilizer distribution and to determine the constraints faced by farmers in obtaining subsidized fertilizer. The experiment was conducted in North Sumatra province Simalungun. This region is determined by purposive sampling. The consideration is that the study site is an area of crop production centers and one of the largest users of fertilizers in North Sumatra. The population in this study is that farmers receiving subsidized fertilizer in the village Purbaganda. Total population is 328 families with a total sample of 30 families. Data were analyzed using analysis of X^2 (Chi Square). The results showed that the factors that affect the smooth distribution of subsidized fertilizer is the price factor and the time distribution of fertilizer policy.

While the distance factor and the factors determining fertilizer requirements do not affect the level of the smooth distribution of fertilizers. Constraints faced by farmers in the smooth distribution of subsidized fertilizer prices among other factors, the time distribution of fertilizer policies and lack of venture capital to the farmers as well as non optimal preparation of Definitive Plan of Group (RDKK) at the level of the farmer groups.

Keywords: Distribution, subsidized fertilizer, rice paddy

PENDAHULUAN

Program utama pembangunan pertanian terdiri dari Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis. Kedua program tersebut pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan menuju Ketahanan Pangan Nasional dan Daerah melalui penyediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu serta merata dengan harga

terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di tingkat rumah tangga. Ketahanan pangan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kesuksesan subsidi pupuk yang mendorong peningkatan penggunaan pupuk dan merembet kepada peningkatan produksi beras (Peningkatan Ketahanan Pangan), merupakan bukti bahwa sesungguhnya petani memberikan respon yang positif

terhadap harga input produksi. Akan tetapi kebijakan ini membawa dampak membengkaknya anggaran subsidi yang ditanggung pemerintah (Amang, 1995). Subsidi harga pupuk mulai diberlakukan pada tahun 1971, dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan pupuk yang merupakan pelengkap input produksi bagi varietas unggul. Pemberian pupuk yang lebih banyak sampai batas tertentu akan meningkatkan produksi beras. Pemberian subsidi pupuk juga dimaksudkan untuk lebih mengefisienkan transfer sumberdaya dari pemerintah ke petani guna membantu pembangunan pedesaan (Amang, 1995).

Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Pupuk bersubsidi merupakan salah satu sarana produksi yang ketersediaannya disubsidi oleh pemerintah untuk petani dan Harga Eceran Tertinggi (HET)-nya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 87 /Permentan /SR.130 /12/2011 (Kementan, 2012).

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan produktivitas usahatani. Oleh karena itu sejarah keberhasilan penyediaan pangan, terutama beras, banyak ditentukan oleh keberadaan pupuk. Pentingnya peranan pupuk dalam sistem

produksi pertanian menjadikan pemerintah selalu memberikan perhatian serius serta mengeluarkan kebijakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Tujuan kebijakan pada dasarnya adalah memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk sesuai dengan kebutuhannya dengan harga yang terjangkau sehingga produktivitas usahatannya dapat meningkat (Darwis dan Nurmanaf, 2004).

Pupuk telah senantiasa berada di lini depan dalam usaha untuk meningkatkan produksi pangan dunia dan mungkin lebih daripada jenis input yang lain. Berbagai usaha telah ditempuh untuk mengukur sumbangan pupuk pada produksi pertanian (subsidi input pertanian). Perkiraan sumbangan pupuk yang digunakan untuk meningkatkan produksi pangan adalah sekitar 50-70% atau lebih di beberapa negara berkembang. Kebanyakan penelitian menunjukkan bahwa pupuk, meskipun bukan merupakan satu-satunya faktor, dianggap sebagai penyumbang hasil dari kombinasi faktor-faktor, yang masing-masing tidak akan efektif tanpa ada yang lainnya. Di Amerika Serikat, 30-40% produksi total tanaman ditentukan oleh penggunaan pupuk (Engelstad, 1997).

Di Indonesia, pemberian subsidi input kepada petani yang disertai dengan

penetapan harga dasar merupakan opsi kebijakan yang telah ditempuh sejak awal Repelita (tahun 1969/1970) pada era pemerintahan Orde Baru untuk menunjang Revolusi Hijau dan program intensifikasi padi dalam upaya mencapai swasembada beras. Jenis input yang disubsidi pada saat itu adalah benih unggul, pupuk kimia (Urea, ZA, TSP, KCl), pestisida dan suku bunga kredit usahatani. Subsidi input tersebut dimaksudkan untuk membantu petani yang sebagian besar miskin dengan kepemilikan modal dan akses sumber modal sangat terbatas yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam upaya meningkatkan produksi dan pendapatan usahatannya (Hadi et al, 2009).

Pabrik pupuk yang sebagian besar adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini telah melaksanakan tugas pemerintah tentang konsep distribusi pupuk kepada petani. Pemerintah sendiri kini telah memperkenalkan konsep Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dalam distribusi pupuk bersubsidi. Konsep ini diyakini akan mampu mengatasi kelangkaan pupuk di tingkat petani yang kerap terjadi pada setiap musim tanam tiba, karena seharusnya petani menerima pupuk bersubsidi sebelum musim tanam dimulai (Anonymous, 2006).

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah penghitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan oleh petani anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. Pemberian pupuk bersubsidi dengan konsep RDKK ini ditujukan kepada petani yang telah bergabung ke dalam kelompok tani. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat daerah yang ditunjuk (Anonymous, 2008).

Manfaat menggunakan sistem RDKK antara lain adalah:

1. Menjamin ketersediaan pupuk untuk petani sesuai dengan Enam Tepat, yaitu: Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Lokasi, Tepat Mutu dan Tepat Harga. Petani yang menjadi anggota kelompok tani dapat memperoleh pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhannya pada waktu yang direncanakan dan harga yang sesuai dengan HET.

2. Memudahkan dalam pengawasan pupuk bersubsidi, karena penjualan pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan permintaan kelompok tani melalui RDKK kepada pedagang pengecer, distributor dan produsen pupuk. Dengan sistem distribusi tertutup ini, pengawasan bisa dilaksanakan secara menyeluruh, karena selain petugas dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang ditetapkan pemerintah, secara tidak langsung pengawasan dilakukan juga disetiap tingkatan mulai dari produsen sampai ke petani pengguna pupuk bersubsidi.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 disebutkan bahwa HET per kg untuk pembelian di kios resmi ditetapkan sebagai berikut: Urea Rp.1.600; SP36 Rp.2.000; ZA Rp.1.400; NPK Rp.2.300; dan Pupuk Organik Rp.500. Distribusi pupuk bersubsidi menggunakan jalur sesuai dengan Permendag Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 yaitu dari produsen (Lini-1 dan Lini-2) ke distributor (Lini-3) dan pengecer (Lini-4). Pelaksanaan pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi dari Lini-1 sampai dengan Lini-4

menjadi kewajiban produsen pupuk, yang diawasi oleh Gubernur/Bupati/Walikota melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) provinsi/ kabupaten/kota.

Sistem pendistribusian pupuk bersubsidi dengan konsep RDKK ini dapat juga dikatakan sebagai sistem distribusi tertutup, hanya petani yang telah bergabung ke kelompok tani yang dapat memperoleh pupuk bersubsidi tersebut. Sistem pendistribusian tertutup mempunyai kekuatan dan kelemahan, yaitu (Syafa'at et al, 2007):

a. Kekuatan

- Peluang petani menggunakan pupuk overdosis (berlebihan) relatif lebih rendah.
- Ketepatan pupuk bersubsidi mencapai sasaran relatif lebih tinggi.

b. Kelemahan

- Keberadaan kelompok tani mutlak diperlukan sebagai tempat untuk mengajukan RDKK.
- Keberadaan PPL mutlak diperlukan sebagai pihak yang mengesahkan RDKK.
- Ada kewajiban bagi pengecer resmi untuk menjual/menyalurkan pupuk subsidi kepada petani dalam kurun waktu tertentu.

Kementerian Pertanian pada 2011 mengalokasikan anggaran untuk subsidi pupuk sebesar Rp.16,38 triliun untuk volume pupuk sebanyak 11,28 juta ton. Jumlah ini menurun dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp.18,41 triliun. Penurunan ini didasarkan atas realisasi penyerapan pupuk di tingkat petani yang tidak mencapai target penyaluran. Namun Menteri Pertanian pada saat itu menyatakan bahwa kebijakan subsidi pupuk tersebut masih perlu dilakukan untuk mendukung pencapaian produksi di tahun depan.

Kabupaten Simalungun sebagai salah satu kabupaten penghasil padi sawah dan ladang, memiliki wilayah pertanian padi yang luas yaitu Desa Purbaganda yang berada di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. Sebagai desa penghasil padi dengan luas panen yang relatif luas, desa ini sangat membutuhkan subsidi pupuk dari pemerintah. Menurut data Kabupaten Simalungun dalam angka (2011), di Kabupaten Simalungun ada 5 kecamatan yang mempunyai luas panen di atas 5.000 ha, yaitu Kecamatan Tanah Jawa (7.860 ha), Dolok Panribuan (5.772 ha), Gunung Malela (5.261 ha), Hutabayu Raja (9.043 ha), dan Pematang Bandar (6.550 ha). Tetapi bila dilihat dari tingkat produktivitas maka Kecamatan Pematang Bandar memiliki

produktivitas padi yang lebih tinggi yaitu 55,51 kw/ha. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi lebih tinggi di Kecamatan Bandar. Hal ini sejalan dengan daerah yang tergolong luas diantara 5 kecamatan yang memiliki luas panen terluas, dengan produktivitas padi yang lebih tinggi. Dengan demikian kelancaran tersedianya pupuk bersubsidi mempengaruhi terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi yang telah diprogramkan daerah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah faktor harga, jarak, jumlah kebutuhan, dan kebijakan distribusi mempengaruhi kelancaran distribusi pupuk bersubsidi?
2. Kendala apa saja yang dihadapi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh faktor harga, jarak, jumlah kebutuhan, dan kebijakan distribusi terhadap kelancaran distribusi pupuk bersubsidi.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Mei 2013 di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara . Wilayah ini ditentukan secara *purposive sampling* (Sugiarto *et al*, 2001) yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada penilaian pribadi penulis yang menyatakan bahwa sampel yang dipilih benar-benar representatif. Adapun pertimbangannya adalah bahwa lokasi penelitian merupakan daerah sentra produksi tanaman pangan dan salah satu daerah pemakai pupuk terbesar di Sumatera Utara.

Populasi dalam penelitian ini adalah petani yang menerima pupuk bersubsidi di Desa Purbaganda. Jumlah populasi adalah 328 KK. Pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak sederhana (*Random Simple Sampling*) (Sugiarto *et al*, 2001), dengan jumlah sampel sebanyak 30 KK.

Adapun data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data hasil wawancara langsung antara peneliti dan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dibuat terlebih dahulu, sedangkan data sekunder merupakan data yang baru diperoleh peneliti dari dinas terkait seperti Kantor Kepala Desa

Purbaganda dan Desa Wonorejo, Kelompok Tani, dan PPL.

Data dianalisis dengan menggunakan analisis X^2 (Chi Kuadrat), sebagai berikut:

$$X^2 = \frac{\sum (n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

Dimana:

X^2 = Chi Kwadrat

n_{ij} = Frekuensi yang diamati

e_{ij} = Frekuensi yang diharapkan

Hubungan antara frekuensi atau jumlah skor yang diamati dengan frekuensi atau skor yang diharapkan dapat ditulis dengan rumus:

$$e_{ij} = \frac{n_i \times n_j}{n}$$

Dimana:

e_{ij} = frekuensi yang diharapkan

n_i = total frekuensi tingkat jawaban sampel

n_j = total skor faktor-faktor yang mempengaruhi

n = total sampel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Distribusi Pupuk Bersubsidi

a. Harga

Faktor harga menjadi pertimbangan penting bagi petani, khususnya petani yang kekurangan modal. Semakin tinggi harga

pupuk maka jumlah pembelian pupuk oleh petani akan semakin sedikit. Jika harga pupuk bersubsidi melampaui harga eceran tertinggi atau bahkan mencapai harga pasar, maka petani akan merasa lebih baik membeli pupuk non subsidi yang tidak

membutuhkan berbagai persyaratan atau prosedur dalam pembeliannya. Tanggapan responden atas pengaruh harga pupuk terhadap kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tabulasi Jawaban Responden Atas Pertanyaan Mengenai Pengaruh Faktor Harga terhadap Kelancaran Distribusi Pupuk Bersubsidi

Faktor Harga	Tingkat Kelancaran Distribusi			Total
	Lancar	Kurang Lancar	Tidak Lancar	
Apakah harga sesuai dengan harga eceran tertinggi distribusi menjadi	17,00	9,00	4,00	30,00
ei	14,00	10,00	6,00	
Apakah harga lebih tinggi dengan harga eceran tertinggi distribusi menjadi	3,00	14,00	13,00	30,00
ei	14,00	10,00	6,00	
Apakah harga dibawah/lebih rendah dengan harga eceran tertinggi distribusi menjadi	22,00	7,00	1,00	30,00
ei	14,00	10,00	6,00	
Total	42,00	30,00	18,00	90,00
Chi square (X^2)	29,46			

Sumber: Data Primer Diolah

Dari Tabel 1 terlihat bahwa jika harga pupuk sesuai atau lebih rendah dari HET maka distribusi menjadi lancar. Tetapi jika harga pupuk bersubsidi lebih tinggi dari HET maka distribusi pupuk bersubsidi menjadi tidak lancar. Kelancaran distribusi pupuk bersubsidi akibat faktor harga terlihat nilai total tingkat kelancaran distribusi lebih tinggi pada bagian lancar dengan nilai 42, kemudian diikuti kurang lancar dengan nilai 30 dan tidak lancar dengan nilai 18.

Nilai *chi square* faktor harga adalah sebesar 29,46, lebih besar dari nilai *chi*

square 5% sebesar 9,49, sehingga diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 . Artinya, faktor harga berpengaruh nyata terhadap tingkat kelancaran distribusi pupuk bersubsidi di daerah penelitian, pada tingkat kepercayaan 95%.

b. Jarak

Jarak yang harus ditempuh oleh petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi juga menentukan kelancaran pupuk. Semakin jauh jarak antara pengecer resmi dengan tempat tinggal konsumen atau petani

maka jarak yang harus ditempuh juga semakin jauh. Jika jarak yang harus ditempuh terlalu jauh maka petani akan mengorbankan biaya tambahan untuk memperoleh pupuk ditambah waktu yang

terbuang untuk menempuh jarak tersebut. Tanggapan responden atas pengaruh jarak pupuk terhadap kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tabulasi Jawaban Responden Atas Pertanyaan Mengenai Pengaruh Faktor Jarak terhadap Kelancaran Distribusi Pupuk Bersubsidi

Faktor Jarak	Tingkat Kelancaran Distribusi			Total
	Lancar	Kurang Lancar	Tidak Lancar	
Apakah jarak antara petani dengan pengecer resmi yang dekat (0-3 km) distribusi menjadi	12,00	11,00	7,00	30,00
<i>ei</i>	10,00	10,67	9,33	
Apakah jarak antara petani dengan pengecer resmi yang sedang (4-7 km) distribusi menjadi	10,00	11,00	9,00	30,00
<i>ei</i>	10,00	10,67	9,33	
Apakah jarak antara petani dengan pengecer resmi yang jauh (>8 km) distribusi menjadi	8,00	10,00	12,00	30,00
<i>ei</i>	10,00	10,67	9,33	
Total	30,00	32,00	28,00	90,00
<i>Chi square (X²)</i>	2,22			

Sumber: Data Primer Diolah

Dari Tabel 2 terlihat bahwa perbedaan jumlah responden yang menjawab lancar, kurang lancar, dan tidak lancar pada setiap jarak tempuh dalam memperoleh pupuk bersubsidi tidak begitu besar. Kelancaran distribusi pupuk bersubsidi akibat faktor jarak dapat terlihat dari nilai total tingkat kelancaran distribusi lebih tinggi pada bagian kurang lancar dengan nilai 32, kemudian diikuti lancar dengan nilai 30 dan tidak lancar dengan nilai 28.

Nilai *chi square* faktor jarak adalah sebesar 2,22, lebih kecil dari nilai *chi*

square 5% sebesar 9,49, sehingga diputuskan untuk menerima H_0 dan menolak H_1 . Artinya, faktor jarak tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat kelancaran distribusi pupuk bersubsidi di daerah penelitian, pada tingkat kepercayaan 95%.

c. Kebutuhan

Pada dasarnya petani tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah kebutuhan pupuk atas lahan usahatani, karena petani tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai perhitungan rekomendasi pemupukan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka kebutuhan pupuk

bersubsidi ditentukan berdasarkan ”musyawarah kelompok tani dibantu PPL setempat”. Tanggapan responden atas

pengaruh penentuan kebutuhan pupuk terhadap kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Tabulasi Jawaban Responden Atas Pertanyaan Mengenai Pengaruh Faktor Penentuan Kebutuhan Pupuk terhadap Kelancaran Distribusi Pupuk Bersubsidi

Faktor Penentuan Kebutuhan	Tingkat Kelancaran Distribusi			Total
	Lancar	Kurang Lancar	Tidak Lancar	
Apakah kebutuhan pupuk bersubsidi pada petani melalui musyawarah di kelompok tani melalui PPL, distribusi menjadi	11,00	13,00	6,00	30,00
<i>ei</i>	10,00	12,33	7,67	
Apakah kebutuhan pupuk bersubsidi pada petani dibolehkan tanpa musyawarah di kelompok tani tetapi melalui PPL distribusi menjadi	9,00	13,00	8,00	30,00
<i>ei</i>	10,00	12,33	7,67	
Apakah kebutuhan pupuk bersubsidi pada petani tidak melalui musyawarah di kelompok tani dan tidak melalui PPL distribusi menjadi	10,00	11,00	9,00	30,00
<i>ei</i>	10,00	12,33	7,67	
Total	30,00	37,00	23,00	90,00
<i>Chi square (X²)</i>	1,02			

Sumber: Data Primer Diolah

Dari Tabel 3 terlihat bahwa perbedaan jumlah responden yang menjawab lancar, kurang lancar, dan tidak lancar pada setiap prosedur penentuan kebutuhan pupuk bersubsidi tidak begitu besar. Kelancaran distribusi pupuk bersubsidi akibat faktor kebutuhan dapat terlihat dari nilai total tingkat kelancaran distribusi lebih tinggi pada bagian kurang lancar dengan nilai 37, kemudian diikuti lancar dengan nilai 30 dan tidak lancar dengan nilai 23.

Nilai *chi square* faktor penentuan kebutuhan pupuk adalah sebesar 1,02, lebih

kecil dari nilai *chi square* 5% sebesar 9,49, sehingga diputuskan untuk menerima H_0 dan menolak H_1 . Artinya, faktor penentuan kebutuhan pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat kelancaran distribusi pupuk bersubsidi di daerah penelitian, pada tingkat kepercayaan 95%. Padahal alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi telah diatur dalam Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/073/Adkomsda-2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Simalungun Tahun 2010.

d. Kebijakan Waktu

Kebijakan waktu penyaluran pupuk bersubsidi sangat penting karena waktu pemupukan pada usahatani sudah ditetapkan dan tidak boleh terlambat. Setiap keterlambatan pemberian pupuk akan

menyebabkan berkurangnya hasil yang diperoleh dari usahatani. Tanggapan responden atas pengaruh kebijakan waktu penyaluran pupuk bersubsidi terhadap kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tabulasi Jawaban Responden Atas Pertanyaan Mengenai Pengaruh Faktor Kebijakan Waktu Penyaluran Pupuk terhadap Kelancaran Distribusi Pupuk Bersubsidi

Faktor Kebijakan Waktu	Tingkat Kelancaran Distribusi			Total
	Lancar	Kurang Lancar	Tidak Lancar	
Apakah kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi pada petani yang sangat tepat waktu pada saat dibutuhkan distribusi menjadi	16,00	9,00	5,00	30,00
ei	12,33	9,67	8,00	
Apakah kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi pada petani yang tepat waktu pada saat dibutuhkan distribusi menjadi	13,00	12,00	5,00	30,00
ei	12,33	9,67	8,00	
Apakah kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi pada petani yang tidak tepat waktu/terlambat pada saat dibutuhkan distribusi menjadi	8,00	8,00	14,00	30,00
ei	12,33	9,67	8,00	
Total	37,00	29,00	24,00	90,00
Chi square (X^2)	10,30			

Sumber: Data Primer Diolah

Dari Tabel 4 terlihat bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat waktu akan menyebabkan distribusi yang semakin lancar. Kelancaran distribusi pupuk bersubsidi akibat faktor kebijakan waktu dapat terlihat dari nilai total tingkat kelancaran distribusi lebih tinggi pada bagian lancar dengan nilai 37, kemudian diikuti kurang lancar dengan nilai 29 dan tidak lancar dengan nilai 24.

Nilai *chi square* faktor kebijakan waktu penyaluran pupuk adalah sebesar 10,30, lebih besar dari nilai *chi square* 5% sebesar 9,49, sehingga diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 . Artinya, faktor kebijakan waktu penyaluran pupuk berpengaruh nyata terhadap tingkat kelancaran distribusi pupuk bersubsidi di daerah penelitian, pada tingkat kepercayaan 95%.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan nilai *chi square* maka

hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh faktor harga, jarak, kebutuhan, dan kebijakan distribusi terhadap kelancaran distribusi pupuk bersubsidi, dapat diterima dimana faktor harga dan kebijakan waktu penyaluran pupuk mempunyai pengaruh yang nyata terhadap kelancaran distribusi pupuk bersubsidi. Sementara faktor jarak dan kebutuhan tidak mempunyai pengaruh yang nyata terhadap kelancaran distribusi pupuk bersubsidi.

Kendala yang Dihadapi Petani dalam Memperoleh Pupuk Bersubsidi

Berikut ini dapat dijelaskan kendala yang dihadapi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi.

a. Kendala yang dihadapi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi antara lain faktor harga, terjadinya disparitas harga antara pupuk bersubsidi pada pertanian rakyat dan pupuk non-subsidi pada pertanian perusahaan besar dengan perbedaan yang sangat besar. Hal ini menimbulkan rangsangan yang kuat bagi para pelaku distribusi pupuk untuk menjual pupuk bersubsidi kepada pengguna pupuk non-subsidi. Akibatnya terjadi kelangkaan pasokan pupuk bagi petani yang seharusnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Harga yang terlalu tinggi mengakibatkan jumlah pupuk

yang seharusnya diberikan sesuai dengan anjuran menjadi dikurangi petani agar biaya produksi tidak membengkak. Hal ini mengakibatkan produksi yang diharapkan dapat tidak tercapai.

- b. Kendala yang kedua adalah kebijakan waktu penyaluran pupuk. Lemahnya pengawasan dan terlambatnya penerbitan SK Pemda menyebabkan pasokan pupuk terlambat dari jadwal, menyebabkan waktu pemupukan menjadi terlambat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi terganggu yang juga dapat mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan.
- c. Sebagian besar kebutuhan modal pada usahatani adalah untuk membeli pupuk dan obat-obatan, sementara petani pada umumnya tidak mempunyai modal yang cukup untuk membeli berbagai sarana produksi pupuk. Apabila harga pupuk tidak disubsidi maka dapat dipastikan bahwa jumlah pupuk yang mampu dibeli petani akan semakin sedikit, sehingga usahatani yang dikelolanya kekurangan pupuk dengan hasil produksi yang rendah.
- d. Kendala lainnya adalah penyusunan RDKK oleh Kelompok Tani sebagian belum didasarkan pada data luas lahan

garapan yang objektif. Menurut ketentuan luas lahan maksimal bagi petani yang mendapatkan subsidi pupuk adalah dua hektar, namun ada beberapa petani yang memiliki lebih dari batas tersebut tetap mendapat subsidi pupuk dengan cara membagi-bagi lahannya atas nama anggota keluarganya. Dalam beberapa kasus, RDKK dibuat oleh kios pupuk karena ada beberapa kelompok petani yang tidak aktif dan bahkan ada yang fiktif. Hal ini disebabkan petugas terkait tingkat kabupaten di desa yang diharapkan memberikan bimbingan dalam penyusunan RDKK belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal karena tidak adanya insentif bagi petugas lapangan untuk kegiatan tersebut, disamping jumlah petugas juga masih sangat kurang. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi dapat diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut faktor yang mempengaruhi kelancaran distribusi pupuk bersubsidi adalah faktor harga dan kebijakan waktu penyaluran pupuk.

Sedangkan faktor jarak dan faktor penentuan kebutuhan pupuk tidak berpengaruh terhadap tingkat kelancaran distribusi pupuk. Kendala yang dihadapi oleh petani dalam kelancaran distribusi pupuk bersubsidi antara lain faktor harga, kebijakan waktu penyaluran pupuk, dan kurangnya modal usaha pada petani serta belum optimalnya penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pada tingkat kelompok tani.

Dari hasil penelitian disarankan kepada Pemerintah supaya pupuk disalurkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani pada saat musim tanam dan kepala PPL untuk lebih meningkatkan peran sertanya membantu petani dalam penentuan kebutuhan pupuk lewat musyawarah kelompok serta memperketat pengawasan penyaluran distribusi pupuk bersubsidi agar kebutuhan petani terpenuhi sesuai dengan yang dibutuhkan melalui musyawarah. Kepada Petani agar petani melakukan pola tanam yang serentak sehingga penyaluran pupuk dilaksanakan secara serentak pula.

DAFTAR PUSTAKA

Amang, B. 1995. Kebijakan Pangan Nasional. PT. Drama Karsa Utama, Jakarta.

- Anonimous, 2006. Kinerja BUMN – Dari Holding BUMN Pupuk Sampai ke RDKK. <http://www.surakarya-online.com/news.html?id=141618>.
- Anonimous, 2008. Peraturan Menteri Pertanian Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009. <http://www.deptan.go.id/pengumuman/permentan42/permentan-no42.2008.pdf>
- Aryanti, Diana, 1997. Tinjauan Dampak Perkembangan Kebijakan Harga Dasar Gabah dan Subsidi Pupuk terhadap Pendapatan Petani, Tesis Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Darwis, V. dan A. R. Nurmanaf, 2004. Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga, dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani. Forum Pengkajian Agro Ekonomi. Volume 22, No 1, Juli 2004. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Pengkajian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Engelstad, O.P. 1997. Teknologi dan Penggunaan Pupuk. Gadjah Mada Univer. Press. Edisi Ketiga. Terjemahan; 947 p.
- Hadi, P.U, Sri H. Susilowati, B. Rachman, Helena. J. Purba, dan Tri B. Purwatntini. 2009. Perumusan Model Subsidi Pertanian untuk Meningkatkan Produksi Pangan dan Pendapatan Petani. Laporan akhir. Pusat Analisi Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Syafaat, N. 2007. Kaji Ulang Sistem Subsidi dan Distribusi Pupuk. Litbang Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.